

## Implementasi Sistem Informasi Analisis Beban Kerja Pada Pegawai di Lingkungan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya

<sup>1</sup>Salsabila Nurmaulidya, <sup>2</sup>Rosyidatuzzahro Anisykurlillah

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

21041010233@student.upnjatim.ac.id rosyida.adne@upnjatim.ac.id

### ABSTRACT

*Workload Analysis is an important process that must be carried out in every agency, both private and government, in order to determine the needs for the number and type of Employee and Employee positions with a Work Agreement based on position analysis and workload analysis. The existence of this Workload Analysis information system can make it easier for organizations to make decisions on employee workload analysis in planning employee arrangements to make them more efficient and accurate. This research uses descriptive research with qualitative methodology. By conducting direct observations and interviews, using the Miles and Hubberman model data analysis method which consists of three stages, the first is data reduction, the second is data display and then the final stage is drawing conclusions. According to George C. Edward III there are several aspects that influence how well policies are implemented, therefore it is important to take a closer look at how ABK information system policies are implemented. These aspects include; bureaucratic structure, resources, disposition, and communication. Based on research findings, these four factors are adequate; the only thing that is limited is the resource element. Not all employees understand how to operate the ABK information system. This is not a serious obstacle for Sawahan District in implementing this policy.*

**Keywords:** Policy Implementation, Information Systems, Workload Analysis

### ABSTRAK

Analisis Beban Kerja merupakan proses penting yang harus dilakukan di setiap instansi baik swasta maupun pemerintahan guna menyusun kebutuhan jumlah serta jenis jabatan Pegawai dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Adanya sistem informasi Analisis Beban Kerja ini dapat memudahkan organisasi untuk mengambil sebuah keputusan pada analisis beban kerja pegawai dalam perencanaan penyusunan pegawai agar lebih efisien dan akurat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metodologi kualitatif. Dengan melakukan observasi dan wawancara langsung, dengan menggunakan metode analisis data model Miles and Hubberman yang terdiri dari tiga tahap yang pertama reduksi data, kedua *display* data kemudian yang terakhir tahap penarikan kesimpulan. Menurut George C. Edward III ada beberapa aspek yang mempengaruhi seberapa baik kebijakan diimplementasikan, oleh karena itu penting untuk melihat lebih dekat bagaimana kebijakansistem informasi ABK diterapkan. Aspek tersebut antara lain; struktur birokrasi, sumber daya, disposisi, dan komunikasi. Berdasarkan temuan penelitian, keempat faktor tersebut sudah memadai; satu-satunya yang terbatas adalah elemen sumber daya. Tidak semua pegawai memahami bagaimana cara mengoperasikan sistem informasi ABK tersebut. Hal ini tidak menjadi hambatan yang cukup serius bagi Kecamatan Sawahan dalam menjalankan

implementasi kebijakan tersebut.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Sistem Informasi, Analisis Beban Kerja

## PENDAHULUAN

Di era pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pada kinerja, optimalisasi sumber daya manusia menjadi faktor kritis dalam mencapai efisiensi dan efektivitas organisasi. Efisiensi dan efektivitas organisasi merupakan dua konsep fundamental dalam manajemen yang sering dibahas beriringan, namun memiliki fokus yang berbeda. Keduanya menjadi tolak ukur kesuksesan organisasi dalam mencapai tujuannya. (Idrus et al, 2023) mengungkapkan bahwa organisasi yang efisien dapat menyelesaikan tugas dengan cepat, tepat, dan dengan penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, dana, dan material yang optimal. Di sisi lain, organisasi yang efektif berfokus pada pencapaian tujuan organisasi yang berhasil mewujudkan visi, misi, dan tujuan strategisnya. Namun, tantangan muncul ketika harus menyeimbangkan antara tuntutan uraian tugas yang banyak dengan ketersediaan pegawai yang tepat, baik dalam jumlah maupun kompetensi (Wahyuningsih, 2018)

Kehadiran analisis beban kerja menawarkan pendekatan yang diperhitungkan untuk menyelesaikan masalah ini. Analisis beban kerja merupakan strategi manajemen yang digunakan secara metodis untuk mengumpulkan data tingkat efikasi dan efisiensi kerja suatu organisasi berdasarkan volume kerja, sesuai Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020. Analisis beban kerja menjadi tolak ukur untuk mengidentifikasi riil pegawai berdasarkan volume, kompleksitas, dan waktu penyelesaian tugas pada pegawai di lingkungan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Tanpa analisis yang tepat, dapat menimbulkan ketimpangan, di mana beberapa jabatan mengalami kelebihan beban kerja sementara yang lain kekurangan. Kondisi ini pun dapat berdampak pada kesejahteraan pegawai. (Mukmin, 2015; Nabawi, 2019) menyatakan bahwa gagasan beban kerja bermula dari kendala pemrosesan informasi. Setiap pegawai diharapkan kompeten untuk melakukan tugas pada tingkat tertentu saat melaksanakannya. Oleh karena itu, dengan memberikan kontribusi sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang diberikan, sumber daya manusia memegang peranan penting dalam keberlangsungan suatu organisasi.

Terdapat kesenjangan antara kapasitas aktual seorang pegawai dengan tingkat kemampuannya yang diharapkan jika menemui tantangan atau hambatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (Permatasari, 2021). Menurut ayat (1) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, "Setiap instansi pemerintah wajib menyusun persyaratan jumlah dan jenis jabatan pegawai negeri berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja." Penjelasan mengenai kebutuhan tenaga kerja yang dirinci berdasarkan jabatan dan pembagian tugas dapat dihasilkan dari analisis beban kerja, baik kuantitas maupun kompetensinya (Anisa & Prastawa 2019). Adanya Sistem Informasi Analisis Beban Kerja ini dapat mengetahui porsi masing-masing jabatan. Implementasi sistem informasi ini merupakan langkah alternatif yang dapat dilakukan untuk menghitung

angka beban kerja di suatu instansi termasuk di Kantor Kecamatan Sawahan.

Permasalahan yang ditemukan di Kecamatan Sawahan adalah beban kerja yang terlalu tinggi dengan pegawai yang sedikit, sehingga tidak mampu bekerja sesuai dengan porsinya. Kondisi ini menyebabkan pemborosan sumber daya dan penyelewengan (Sudrajat & Mujadidi, 2023). Tantangan utama dalam melakukan analisis beban kerja adalah adanya data pendukung yang belum relevan. Sulitnya mengumpulkan data dukung yang sesuai antara waktu yang dihabiskan oleh pegawai untuk menyelesaikan tugas sesuai yang diberikan (Putra, 2024). Selain itu yang menjadi kendala adalah kurangnya pemahaman mengenai penyusunan Analisis Beban Kerja. Hal ini terjadi di Kantor Kecamatan Sawahan dan juga Kelurahan yang berada di bawah Kecamatan Sawahan tersebut. Kurangnya pelatihan maupun sosialisasi yang kurang merata mengenai Analisis Beban Kerja. Masih ditemukan banyak kekeliruan atau kesalahan dalam teknis

Banyak pegawai yang meremehkan teknik pengisian Analisis beban Kerja sehingga data pendukung yang di *upload* di *website* banyak yang kurang relevan dengan uraian tugas. Kurangnya pemahaman bagaimana analisis ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi mereka. Sehingga hasil ABK belum dapat menggambarkan jumlah kebutuhan pegawai yang ideal di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Dari hasil pemaparan permasalahan di atas menjadi latar belakang peneliti untuk menjadikan kasus ini sebagai topik penelitian tentang “Implementasi Sistem Informasi Analisis Beban Kerja Pada Pegawai di Lingkungan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya”. Bagian penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan dan peraturan adalah implementasi kebijakan (Prambudi Adha dkk., 2022). Menurut (Sutmasa, 2022), implementasi kebijakan mengacu pada aktivitas apa pun yang dilakukan oleh organisasi swasta, publik, atau pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam pilihan kebijakan. Analisis Beban Kerja pegawai Kabupaten Sawahan menggunakan teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III, yang mengidentifikasi empat komponen keberhasilan implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, untuk memajukan implementasi sistem informasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan metodologi kualitatif. Analisis sering digunakan dalam penelitian deskriptif, atau pendekatan kualitatif (Fitriani, 2022). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan komprehensif tentang Implementasi Sistem Informasi Analisis Beban Kerja Pegawai di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Data dan informasi diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Untuk memperoleh data dan keterangan dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada informan yaitu staf operator sistem di Kecamatan Sawahan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis data Miles and Hubberman yang terdiri dari tiga tahap yang pertama reduksi data, kedua *display* data kemudian yang terakhir tahap

penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut model implementasi kebijakan George Edward III (Mansur, 2021), kekurangan informasi dan fokus merupakan permasalahan utama yang dihadapi administrasi publik. Edward mengatakan, pengambil kebijakan tidak akan berfungsi dengan baik jika tidak ada implementasi yang baik. Untuk memastikan bahwa kebijakan diterapkan secara efektif, Edward mengusulkan untuk fokus pada empat faktor: struktur birokrasi, komunikasi, disposisi, dan sumber daya.

### Komunikasi

Untuk meminimalkan distorsi implementasi, diperlukan komunikasi antara regulator dan pelaksana untuk memastikan konsistensi maksud dan tujuan sasaran kebijakan yang dilaksanakan. Pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan saling berkomunikasi (Ardiyasa & Rahayu, 2022). Ketika seorang pelaksana bertugas menjalankan suatu kebijakan, maka sosialisasi merupakan metode komunikasi yang digunakan antara kedua kelompok masyarakat tersebut. Para pelaksana percaya bahwa model komunikasi berbasis sosialisasi bekerja dengan baik karena memungkinkan mereka mendapatkan informasi langsung dari pembuat kebijakan sehingga mengurangi penyebaran informasi palsu. Pegawai Kecamatan Sawahan melakukankomunikasi sebagai bagian dari implementasi kebijakan Sistem Informasi Analisis Beban Kerja. Bagian Organisasi sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan sistem informasi analisis beban kerja yang mengomunikasikan berbagai persiapan dalam penyusunan kebijakan ini. Di Kantor Kecamatan Sawahan sendiri sejak awal pengimplementasian kebijakan sistem informasi analisis beban kerja ini komunikasi sudah dilakukan dengan baik. Komunikasi yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi berjalan dengan baik dengan OPD di Kecamatan Sawahan. Kegiatan komunikasi ini dilakukan di kantor Bagian Organisasi dengan dihadiri beberapa pegawai Kecamatan Sawahan. Komunikasi yang dijalin dengan baik sejak awal tentunya memudahkan implementasi kebijakan sistem informasi ABK dan berjalan dengan baik.

### Sumber Daya

(Shobihatun Naqibah et al., 2021) berpendapat bahwa kebijakan yang sudah dikomunikasikan tidak akan berjalan dengan lancar apabila kekurangan sumber daya, maka dari itu untuk memaksimalkan kebijakan diperlukan sumber daya dapat berupa sumber daya manusia seperti sumber daya finansial dan kompetensi *implementor*. Setiap OPD memiliki sumber daya manusia yang berbeda beda. Latar belakang tingkat pendidikan menjadi pengaruh kinerja pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan sistem informasi ABK tersebut. Tidak semua pegawai paham bagaimana cara pengisian hingga mengoperasikan sistem informasi tersebut. Selain kurangnya pemahaman mengenai cara mengoperasikan sistem informasi, para pegawai juga kurang memahami bagaimana data pendukung yang benar, biasanya pegawai hanya

mengupload foto kegiatan tanpa dijelaskan keterangan mengenai foto tersebut, maka data dukung tersebut tidak valid atau tidak terbaca target dan frekuensinya. Hal ini dianggap kurang maksimal karena ada pegawai yang kemampuannya pas-pasan sehingga untuk mengisi ABK di sistem informasi itu hanya dikoordinasikan di beberapa orang saja yang memiliki cukup wawasan mengenai sistem informasi ABK. Dampaknya pelaksanaan implementasi kebijakan menjadi kurang efektif. Sumber daya finansial di Kecamatan Sawahan dirasa sudah cukup, sumber daya yang lainnya seperti sarana prasarana seperti WiFi juga terkadang menjadi kendala, koneksi WiFi yang tidak lancar juga dapat menjadi hambatan implementasi kebijakan sistem informasi ABK. Untuk sarana dan prasarana lainnya seperti komputer itu dirasa sudah memadai.

## Disposisi

Kejujuran, komitmen, dan sifat demokrasi merupakan sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh *implementor*. *Implementor* akan menjalankan kebijakan dengan baik apabila *implementor* memiliki disposisi yang baik. Implementasi dapat menjadi tidak efektif apabila *implementor* memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan. Dalam (Ardyasa & Rahayu 2022) George C. Edward III mengungkapkan disposisi sebagai pendorong keberhasilan implementasi kebijakan. Karena apabila pelaksanaan kebijakan didasari sikap, keinginan, dan komitmen untuk melaksanakan implementasi kebijakan akan menghasilkan implementasi kebijakan yang baik. Dalam implementasi kebijakan sistem informasi ABK di Kecamatan Sawahan para *implementor* memiliki kesungguhan dan juga komitmen untuk mengisi data dukung di sistem informasi ABK. Jika *implementor* tidak melaksanakan disposisi atau sikap pelaksana dengan baik, maka akan mempengaruhi nilai ABK di Kecamatan Sawahan. Dalam penelitian lapangan yang telah dilakukan di Kecamatan Sawahan terlihat para *implementor* melaksanakan implementasi kebijakan sistem informasi ABK ini dengan penuh tanggung jawab yang baik.

## Struktur Birokrasi

Para pihak harus bekerja sama untuk menerapkan kebijakan yang rumit. Sebagai pelaksana kebijakan, George C. Edward III mengatakan bahwa koordinasi yang efektif antara birokrasi dan pengambil kebijakan diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan mendapat dukungan yang memadai. Ketidakefektifan dan hambatan implementasi kebijakan terjadi ketika struktur birokrasi tidak mendukung implementasi kebijakan.

Pola hubungan kewenangan dan koordinasi antara agen pelaksana (instansi) yang terhubung dengan pelaksana kebijakan dapat digunakan untuk memahami struktur birokrasi atau organisasi (Setyawan et al., 2016). Dapat dikatakan telah terjadi koordinasi dan kolaborasi yang sangat baik pada setiap aspek struktur organisasi dalam membangun sistem informasi ABK di Kabupaten Sawahan, baik dari Bagian Organisasi maupun kantor Kecamatan Sawahan. Masing-masing komponen ini telah bekerja sama secara efektif untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Begitu pula dengan Bagian Organisasi yang telah melakukan

tugasnya dengan baik dalam mengatur dan menginformasikan kepada OPD Kabupaten Sawahan mengenai segala permasalahan yang berkaitan dengan awak kapal. Kita dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan yang sukses dapat dicapai dengan adanya komponen-komponen yang mampu tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari temuan penelitian terhadap implementasi kebijakan sistem informasi analisis beban kerja di Kabupaten Sawahan dapat dijelaskan melalui penjelasan di atas. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup aspek-aspek seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, penulis dapat membuat kesimpulan berikut pada bagian ini. *Pertama*, dari sisi komunikasi. Dari hasil temuan analisis, dapat diketahui bahwa komunikasi antara pembuat kebijakan dengan *implementor* yaitu antara pihak Bagian Organisasi dengan Kecamatan Sawahan sudah berjalan dengan baik. *Kedua*, sumber daya. Faktor ini dalam implementasi kebijakan sistem informasi ABK belum terpenuhi dengan baik. Menurut informan dari peneliti ini, latar belakang tingkat pendidikan menjadi pengaruh pengisian ABK di sistem informasi ini. Kurangnya pemahaman yang cukup menjadikan hal ini berjalan menjadi kurang efektif. Seperti halnya kurang pemahaman terkait bagaimana format data dukung yang benar dan valid. Maka dari itu pengisian ABK ini hanya diserahkan di beberapa staf kantor yang mempunyai pemahaman yang cukup. Selain itu adanya faktor sumber daya lainnya, seperti sumber daya finansial yang cukup memadai. *Ketiga*, Disposisi. Pelaksanaan implementasi kebijakan sistem informasi ABK yang dilakukan Kecamatan Sawahan sudah cukup berjalan dengan baik. Pegawai sudah mempunyai sikap-sikap yang menunjang keberhasilan implementasi kebijakan yang baik. *Keempat*, Struktur Birokrasi. Setelah koordinasi selesai maka syarat unsur struktur birokrasi yang digariskan oleh George C. Edward III dalam teori eksekusi kebijakan terpenuhi.

Secara garis besar implementasi kebijakan sistem informasi ABK di Kecamatan Sawahan dapat dikategorikan sudah berjalan cukup efektif tetapi perlu dimaksimalkan lagi dalam pelaksanaannya agar menghasilkan implementasi kebijakan yang baik. Adapun saran dan masukan yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu seperti; Kecamatan Sawahan lebih konsisten dalam melaksanakan implementasi kebijakan sistem ABK ini. Kecamatan Sawahan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan terhadap sumber daya manusia yang kurang pemahaman dengan diadakannya sosialisasi terkait bagaimana pengisian ABK yang benar di Sistem Informasi dengan tujuan agar para staf atau pegawai yang kurang memadai dapat menunjang kinerja yang lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

Anisa, H. N., & Prastawa, H. (2019). Analisis Beban Kerja Pegawai Dengan Metode Full Time Equivalent (FTE) (Studi Kasus Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng

dan DIY). *Industrial Engineering Online Journal*, 7(4).

Ardiyasa, G. G., & Rahayu, E. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SMART KAMPUNG DI KABUPATEN BANYUWANGI. *Jurnal MODERAT*, 8(4).

Fitriani, Y. IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ANALISIS BEBAN KERJA PEGAWAI. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 158-162.

Idrus, S., Ruhana, F., Rani Amalia, M., Fathor Rosyid, A., Kuswandi, D., & Tinggi Pariwisata Mataram, S. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA YANG EFEKTIF DALAM MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI DI ERA BISNIS GLOBAL. 7(1), 2023.

Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324-334.

Menpan. (2020). *Peraturan Menteri PANRB RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja*. 1-30.

Mukmin, S. (2015). Pengaruh beban kerja, lingkungan kerja dan dukungan sosial terhadap burnout pustakawan di kota Mataram. *Pengaruh Beban Kerja, Lingkungan Kerja dan Dukungan Sosial Terhadap Burnout Pustakawan di Kota Mataram*, 3(2), 125-145.

Nabawi, R. (2019). Pengaruh lingkungan kerja, kepuasan kerja dan beban kerja terhadap kinerja pegawai. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 2(2), 170-183.

Permatasari, I. (2021). Analisis Beban Kerja Dan Kebutuhan Pegawai Seksi Pengelolaan Bidang Guru Dan Tenaga Kependidikan. *Jurnal Tata Kelola Pendidikan*, 3(2), 99-108.

Prambudi Adha, R., Koeswara, H., & Aromatica, D. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPUSTAKAAN DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN MINAT BACA MASYARAKAT IMPLEMENTATION OF REGIONAL LIBRARY POLICY IN EFFORTS TO INCREASE COMMUNITY'S READING INTEREST. In *Jurnal Kebijakan Publik: Vols. XX, No.X*. <https://jkp.ejournal.unri.ac.id>  
<https://jkp.ejournal.unri.ac.id>

Putra, Z. A. D., & Ismail, H. (2024). Implementasi Aplikasi Analisis Beban Kerja Terkait Kinerja Pegawai di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(2), 189-199.

Republik Indonesia (2014) *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*

Setyawan, D., Nanang, D., & Srihardjono, B. (2016). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG DESA DENGAN MODEL EDWARD III DI DESA LANDUNGSARI KABUPATEN MALANG. 6(2).

Shobihatun Naqibah, L., Cikusin, Y., Zainal Abidin, A., Kunci, K., Kebijakan, I., & Administrasi Kependudukan, P. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

# Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 6 Nomor 11 (2024) 4909 – 4916 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691  
DOI: 10.47476/reslaj.v6i11.3420

*PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS E-SERVICE (Studi Kasus Pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang)* (Vol. 15, Issue 9).

Sudrajat, O. :, & Mujadidi, S. (2023). *JIPSINDO (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Indonesia)* Implementasi program sekolah siaga kependudukan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. 10(02), 100–114.  
<https://doi.org/10.21831/jipsindo.v10i2.63743>

Sutmasa, Y. G. (n.d.). MEMASTIKAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK. In *JURNAL CAKRAWARTI*.

Wahyuningsih, S. (2018). Pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja. *WartaDharmawangsa*, (57).